

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Dalam hal tersebut tertuang dalam UUD pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pembangunan ekonomi dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang menengah kebawah.

Tujuan yang dimaksud di atas hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan negara telah berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang menyeluruh dan merata. Hal ini tidak mungkin dicapai oleh pemerintah sendiri atau oleh masyarakat sendiri, maka usaha kesejahteraan sosial harus dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan seluruh masyarakat berdasarkan semangat kekeluargaan. Perkembangan kehidupan sosial yang sehat akan tumbuh dari masyarakat itu sendiri, tanpa adanya paksaan dari luar.

Usaha kesejahteraan sosial tersebut merupakan salah satu cara untuk mewujudkan sarana utama untuk secara langsung dapat memperbaiki syarat kehidupan dan penghidupan rakyat, sehingga rakyat akan lebih mampu dan bersedia untuk aktif ikut serta dalam usaha-usaha pembangunan nasional. Penentuan keberhasilan pembangunan salah satu di antaranya adalah penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Bantuan sosial mendapat banyak perhatian publik karena memiliki kepentingan yang perlu diakomodir untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, menanggulangi penyakit sosial dan memuat kepentingan politik dalam arti luas. Tujuan bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan dan kurang mampu. Bantuan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi kemiskinan, dan memberikan perlindungan sosial. Selain itu, bantuan sosial juga bertujuan untuk mendorong kemandirian penerima manfaat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011 menyebutkan: “bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif, bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial”.

Tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga September 2024. Persentase penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Maret 2020 adalah 12,28% dan September 2024 turun menjadi 10,40%. Meskipun Tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah turun namun masih di atas rata-rata nasional yakni 8,57% pada September 2024. Bantuan sosial dan program pemerintah dapat berperan dalam penurunan kemiskinan. Bantuan sosial memberikan dukungan langsung kepada kelompok rentan, sementara program pemerintah menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup, membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Adapun

perbandingan tingkat kemiskinan yang ada di Pulau Jawa bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (%)**

| PROVINSI      | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|------|
| DKI JAKARTA   | 4,69  | 4,67  | 4,61  | 4,44  | 4,14 |
| JAWA BARAT    | 8,43  | 7,97  | 7,98  | 7,62  | 7,08 |
| JAWA TENGAH   | 11,84 | 11,25 | 10,98 | 10,77 | 9,58 |
| DI YOGYAKARTA | 12,8  | 11,91 | 11,49 | 11,04 | 10,4 |
| JAWA TIMUR    | 11,46 | 10,59 | 10,49 | 10,35 | 9,56 |
| BANTEN        | 6,63  | 6,5   | 6,24  | 6,17  | 5,7  |

Sumber: BPS 2025

Tabel di atas menunjukkan persentase kemiskinan yang ada di Pulau Jawa mengalami penurunan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan yang sangat besar antara tahun 2020-2024 yaitu sudah berkurang sebanyak dua persen, lebih besar dari provinsi lainnya.

Salah satu program pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam implementasi bantuan sosial tersebut diwujudkan dengan adanya program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah melalui APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan didistribusikan dengan pemerintah kabupaten/kota yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Program tersebut diselenggarakan serentak oleh pemerintah untuk seluruh warga masyarakat kategori kurang mampu atau pra sejahtera di Daerah Istimewa Yogyakarta dan diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan dan dapat menambah taraf kesejahteraan warga masyarakat yang semakin merata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga yang berhak menerima bantuan sosial adalah masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis ekonomi, sosial, politik dan bencana alam, supaya yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai program selama tahun 2020-2024, seperti Bantuan Sosial Pangan (BSP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, ada juga bantuan untuk lansia seperti Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) dan Bantuan Sosial Aslum, berdasarkan laporan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semua program bantuan sosial ini berasal dari APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Program bantuan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta 2020-2024:

1. Bantuan Sosial Pangan (BSP)

Program ini ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan anggaran yang bervariasi.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH membantu keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BLT merupakan bantuan tunai langsung yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi *Covid-19* dan lainnya.

4. Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Bantuan Sosial ASLUM

Bantuan ini ditujukan untuk lansia di Kota Yogyakarta, dengan nilai bantuan Rp 300.000 per bulan selama 2 bulan.

Penelitian Salsabila dkk (2024) tentang efektivitas bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia mendapati bahwa program bantuan sosial memiliki dampak signifikan dalam menekan angka kemiskinan. Penelitian lain oleh Swandriano dan Arif (2023) mengenai efektivitas program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus menghasilkan kesimpulan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH), Dana Desa (DD), dan Program Indonesia Pintar (PIP) akan memerangi kemiskinan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kudus. Program Indonesia Pintar berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 sampai dengan 2021, sesuai dengan temuan uji validitas pengaruh (uji t) pada model ekonometrika. Program Indonesia Pintar berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan kecamatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti tentang Hubungan Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang sudah di jelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana Hubungan Antara Bantuan Sosial dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk Menganalisis Hubungan Bantuan Sosial dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian sebagai berikut:

1. Menjadi literatur ilmiah maupun acuan dalam penelitian yang selaras dengan penelitian ini.
2. Menjadi sarana penulis untuk menyelesaikan studi, menerapkan ilmu yang telah dipelajari, serta mengembangkan pengetahuan untuk penulis.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN:** Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** Merupakan definisi dari teori yang dipakai terkait kemiskinan dan bantuan sosial, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

**BAB III METODE PENELITIAN:** Terdiri dari data, sumber data, dan definisi operasional.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN:** Merupakan uraian pembahasan dan hasil dari penelitian.

**BAB V PENUTUP:** Terdiri dari saran dan kesimpulan dari hasil penelitian.